

DEMOKRASI PRIBUMI

Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Demokrasi yang dihayati masyarakat bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke. Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, baik nilai-nilai luhur demokrasi yang ada dalam Pancasila maupun yang ada dalam tiap-tiap budaya masyarakat bangsa Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia. Demokrasi seperti ini disebut demokrasi pribumi.

ISBN 602999556-1



9 786029 995565

DEMOKRASI PRIBUMI

Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Penyunting:
Bertolomeus Bolong
Fredrick Y. A. Doeka

Pengantar:
Suparman Marzuki
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



DEMOKRASI PRIBUMI

Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Penyunting :

Bertolomeus Bolong
Fredrik Y. A. Doeka

Kata Pengantar :

Suparman Marzuki

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Penerbit:
Bonet Pinguwir
2014

Demokrasi Pribumi

Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Cetakan I : Oktober 2014

Penerbit : Bonet Pinguwir
Jalan Sumba Tuak Sabu RT 10 RW 03
Kelurahan Lasiana, Kupang-NTT

Percetakan : CV. Kalam Offset
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 9,5 No. 14,
Sleman, Yogyakarta, - 55581
Telp. 0274 869607

PENGESAHAN
Telah Cover & Lay Out oleh Kalam Ibrahim
Sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 15 DEC 2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Ar-Raniry ISBN : 978 - 602 - 99955 - 6 - 5

Hanafi Amrani, SH, MH., LL.M., Ph.D

NIP. 904103105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, termasuk fotokopi tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Prakata | iii |
| Kata Pengantar | v |
| <i>Dr. Suparman Marzuki, M.Si</i> | |
| <i>Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia</i> | |
| Daftar Isi | ix |
| Bab I : Wajah Demokrasi Dalam Struktur | |
| Kekuasaan Adat Orang Riung..... | 1 |
| <i>(Dr. Bertolomeus Bolong)</i> | |
| 1. Pendahuluan..... | 1 |
| 2. Jejak dan Makna demokrasi | 3 |
| 3. Demokrasi di Indonesia | 6 |
| 4. Demokrasi Dalam Struktur Kekuasaan | |
| Adat Orang Riung..... | 10 |
| 4.1. Orang Riung | 10 |
| 4.2. Kebudayaan | 11 |
| 4.3. Struktur Kekuasaan Adat..... | 13 |
| 4.4. Nilai-Nilai Demokrasi | 21 |
| 5. Penutup | 43 |
| Bab II : Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Partai | |
| Politik Lokal Pada Masyarakat Aceh..... | 45 |
| <i>(Dr. Muntoha)</i> | |
| A. Pengantar | 45 |
| B. Demokrasi dan Partai Politik..... | 46 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| | C. Partai Politik Lokal Aceh Sebagai Instrumen Demokratisasi..... | 57 |
| | D. Pentup..... | 64 |
| Bab III | : Praksis Demokrasi dan Kearifan Lokal Dalam Kebencanaan: Pengalaman Warga Lereng Gunung Merapi..... | 66 |
| | <i>(Dr. Suryo Adi Pramono)</i> | |
| | 1. Pengantar..... | 66 |
| | 2. Kontroversi Kebijakan Relokasi..... | 78 |
| | 3. Kearifan Lokal..... | 92 |
| | 4. Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal?..... | 100 |
| | 5. Penutup..... | 106 |
| Bab IV | : Demokrasi Berbasis <i>Local Wisdom</i>: Studi Tentang Sistem Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan..... | 107 |
| | <i>(Dr. Yusdani)</i> | |
| | 1. Pendahuluan..... | 107 |
| | 2. Sistem Pemerintahan Marga..... | 112 |
| | 3. Good Governance Dalam Sistem Marga.. | 121 |
| | 4. Pengelolaan Konflik..... | 123 |
| | 5. Pengelolaan Sumber Daya..... | 125 |
| | 6. Penutup..... | 127 |
| Bab V | : Nilai-nilai Demokrasi Dalam Kearifan Lokal Taramiti Tominuku Orang Alor..... | 129 |
| | <i>(Dr. Fredrik Y.A. Doeka, MA)</i> | |
| | 1. Pendahuluan..... | 129 |

| | |
|---|-----|
| 2. Taramiti Tominuku dan Implikasi Sosialnya..... | 131 |
| 3. Tantangan Taramiti Tominuku..... | 136 |
| 4. Persaudaraan : Nilai yang dibutuhkan hari ini..... | 142 |
| 5. Kesimpulan..... | 144 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| Bab VI | : Demokrasi dan Hak Politik Perempuan Dalam Jabatan Publik..... | 146 |
| | <i>(Prof.Dr. Agustinus Supriyanto)</i> | |

| | |
|--|-----|
| 1. Pengantar..... | 146 |
| 2. Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan Publik Berdasarkan Instrumen Internasional | 146 |
| 3. Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan Publik Menurut Hukum Nasional..... | 148 |
| 4. Masa Depan Pendidikan Berperspektif Gender..... | 154 |
| 5. Penutup..... | 157 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| Bab VII | : Marginalisasi Partisipasi Politik Perempuan dan Proses Politik Praktis Dalam Teks Media Lokal NTT..... | 158 |
| | <i>(Dr. Eduardus Dosi)</i> | |

| | |
|--|-----|
| 1. Pendahuluan..... | 158 |
| 2. Frame-Frame Yang Ditemukan..... | 164 |
| 3. Kelompok Frame Dominasi Distruktif Elit Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan..... | 161 |
| 4. Pertarungan Kekuasaan..... | 177 |
| 5. Literasi Politik..... | 179 |

| | |
|---|------------|
| 6. Memperhatikan Yang Lemah..... | 180 |
| 6. Penutup..... | 181 |
| Bab VIII : Nilai Proteksi Inklusif Rumah (<i>Ume</i>) Komunitas Amarasi Pulau Timor Bagi Perspektif Pengelolaan Lingkungan Hidup | 183 |
| <i>(Dr. Junus E.E. Inabuy, STM)</i> | |
| 1. Pendahuluan..... | 183 |
| 2. Ekonomi dan Ekologi | 186 |
| 3. Masyarakat Rumah (<i>House society</i>)..... | 189 |
| 4. Konsep-konsep Utama di Sekitar <i>Ume</i> (Rumah) | 189 |
| 4.1. Kosmologi | 190 |
| 4.2. <i>Kuan Ma Bare'</i> (Kampung Halaman)..... | 191 |
| 4.3. <i>Ume Ma Ropo</i> (Rumah dan Balai): Peran Protektif | 192 |
| 5. Prospek Peran Nilai <i>Ume</i> (Rumah) Bagi Perawatan Lingkungan Hidup | 197 |
| 5.1. Nilai Proteksi <i>Ume</i> | 197 |
| 5.2. Manajemen Proteksi: Hemat | 198 |
| 5.3. Etos Inklusif Teologis: Takut Akan Tuhan | 200 |
| 6. Penutup | 200 |
| KEPUSTAKAAN | 203 |
| TENTANG PENULIS | 218 |

Bab II

Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Partai Politik Lokal Pada Masyarakat Aceh

Munthoha

A. Pengantar

Perkembangan demokrasi pada beberapa negara di belahan dunia seperti Amerika dan Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kondisi seperti itu wajar karena mereka tergolong negara-negara maju. Namun, perkembangan pesat dari kemajuan demokrasi tersebut juga telah mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan yang ada pada negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.

Pengaruh berkembangnya demokrasi di Indonesia selain berkaitan erat dengan sistem konstitusi yang dianut oleh bangsa Indonesia, pengaruhnya terlihat juga pada kehidupan politik di Indonesia. Pengaruh dari sistem konstitusi Indonesia terlihat dari sistem konstitusi mulai dari yang bersifat demokrasi terpimpin sampai dengan sistem konstitusi yang lazim disebut demokrasi Pancasila. Sedangkan pengaruhnya dari kehidupan perpolitikan, contoh konkret dari perkembangan demokrasi yang masih dapat terlihat pada masa sekarang ini, yaitu menjamurnya partai-partai politik baru setelah runtuhnya rezim Orde Baru.

B. Demokrasi Dan Partai Politik

1. Demokrasi Sebagai Landasan Ideologi Politik Kenegaraan Modern

Sedikitnya ada sepuluh nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :¹

- 1) *Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.* Konstitusi adalah produk hukum. Namun, pada saat yang bersamaan, ia harus lebih dari sekedar hal itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah;
- 2) *Pemilu yang demokratis.* Sebagus apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis, kecuali pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya;
- 3) *Federalisme, Pemerintahan Negara Bagian dan Lokal.* Prinsip demokrasi mengharuskan desentralisasi kekuasaan agar semakin dekat dengan rakyatnya;
- 4) *Pembuatan Undang-undang.* Kunci pembuatan hukum yang demokratis tidak terletak pada tata cara atau bahkan forum di mana peraturan itu dihasilkan, tetapi pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat;
- 5) *Sistem Peradilan yang Independen.* Pengadilan adalah pembela terbesar hak-hak individu. Pengadilan juga bisa

menjadi sangat kuat dalam demokrasi. Melalui banyak cara, pengadilan adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang ada di konstitusi;

- 6) *Kekuasaan Lembaga Kepresidenan.* Dalam alam demokrasi, seorang presiden harus memerintah melalui kecakapan politiknya. Ia harus memantapkan kerangka kerjasama yang baik dengan lembaga legislatif, dan di atas semua itu, dengan rakyatnya. Pada saat yang bersamaan, penduduk juga harus merasa aman bahwa pembatasan konstitusi menjamin presiden atau perdana menteri adalah abdi, bukannya majikan bagi rakyat;
- 7) *Peran Media yang Bebas.* Dalam demokrasi, rakyat bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidakefisienan, dan ketidakefektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Tak ada negara yang bisa bebas tanpa adanya pers, dan satu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman pers;
- 8) *Para Kelompok Kepentingan.* Karena semakin banyak masalah yang perlu disuarakan oleh pemilih dan agar suara mereka didengar dalam masalah-masalah spesifik, warga membentuk kelompok-kelompok lobi, kelompok-kelompok penyokong kepentingan publik dan swasta dan LSM yang khusus bekerja untuk satu masalah;
- 9) *Hak Masyarakat untuk Tahu.* Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya dan sebisa mungkin bersikap terbuka. Artinya, gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama; dan
- 10) *Melindungi Hak-hak Minoritas.* Jika “demokrasi” diartikan sebagai kehendak mayoritas, salah satu masalah besar

¹ Melvin J. Urofski, dalam Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Humaniora, Bandung, 2004, hlm. 26 – 27.

adalah bagaimana minoritas diperlakukan, yakni mereka yang secara ras, etnis dan keagamaan berbeda dengan mayoritas.

Nilai-nilai demokrasi tersebut di atas, yang pada akhirnya menjadi kesadaran bersama untuk dikembangkan dalam kehidupan masing-masing negara. Nilai-nilai tersebut kian memperkaya perkembangan gagasan demokrasi dari masa ke masa sehingga demokrasi menjadi isu sentral dalam kehidupan bernegara dan berbangsa umat manusia di masa modern.²

Pada masa modern, studi tentang demokrasi tidak hanya mendasarkan pada satu tumpuan seperti negara, tetapi telah menyebar dan tersebar pada tiga tumpuan sebagai fokus analisis, yakni *state* (negara), *society* (masyarakat), dan *market* (pasar). Ketiga tumpuan dari studi demokrasi itu pada gilirannya dapat dikatakan telah melahirkan warna-warna demokrasi, yakni demokrasi berwarna negara (demokrasi negara atau *democracy of state*); demokrasi berwarna masyarakat (demokrasi masyarakat atau *democracy of society*); dan demokrasi berwarna pasar (demokrasi pasar atau *democracy of market*). Secara deskriptif, ketiga warna demokrasi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :³

² *Ibid.*, hlm. 28.

³ Asep Sahid Gatara FH dan Subhan Sofhian, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Cetakan ke-2, Fokusmedia, Bandung, 2012, hlm. 127 – 134.

Demokrasi – Negara (*State-Democracy*)

Studi demokrasi yang bertumpu pada *state* ini misalnya pernah tumbuh dominan dalam kehidupan masyarakat Eropa di masa abad pertengahan. Pada masa ini lahir beragam pemikiran besar tentang relasi antara rakyat dengan penguasa, atau masyarakat dan negara. Di antara pemikiran besar itu, yang banyak dipandang telah menggegerkan kesadaran masyarakat Eropa bahkan masyarakat dunia pada masa itu, misalnya adalah pemikiran Machiavelli dengan pemikirannya mengenai konsep kekuasaan yang realis-pragmatis. Kemudian disusul oleh gagasan-gagasan tentang kontrak sosial dan separasi kekuasaan dari Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan J. J. Rousseau. Belakangan, pemikiran itu telah memberikan sumbangan signifikan bagi upaya mendefinisikan kembali dan juga aktualisasi istilah dan konsep demokrasi.⁴

Pada ranah praksis, dari studi demokrasi yang bertumpu pada negara (*state-democracy*) ini cenderung bercirikan banyaknya keterlibatan para aktor atau institusi negara. Di antaranya; (1) Aktor militer, yang biasanya berasal dari para perwira aktif yang gemar ikut terlibat dalam persoalan sosial-politik pada ranah masyarakat sipil; (2) Sistem kepartaian terbatas, seperti partai tunggal, dwi-partai dan tri-partai. Di sini partai politik yang ada hanya diperankan secara terbatas, yakni berperan sebagai kepanjangan tangan negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik (khususnya kebijakan demokratisasi) serta kebijakan lainnya; (3) Ketiadaan otonomi partisipasi. Di sini keikutsertaan masyarakat dalam

⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 109 – 256.

proses politik yang tengah dibangun tidaklah bersifat sukarela melainkan bersifat keterpaksaan melalui mekanisme mobilisasi; dan (4) Ketidadaan partisipasi langsung. Ini artinya partisipasi masyarakat bersifat tidak langsung melainkan partisipasi melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks ini masyarakat luas tidak memiliki keleluasaan dan keluasan untuk menentukan secara langsung arah pembangunan negara. Masyarakat luas dianggap tidak berdaya danyang berdaya adalah aktor-aktor yang mewakilinya di lembaga-lembaga negara, baik di lembaga parlemen maupun lembaga pemerintahan.⁵

Demokrasi – Masyarakat (*Society – Democracy*)

Dalam studi demokrasi yang bertumpu pada masyarakat ini, kekuatan masyarakatlah sebagai prasyarat bagi tumbuh-kembangnya sebuah paham dan praktik demokrasi (demokratisasi). Pemberdayaan masyarakat pada tipe demokrasi ini biasanya dilakukan melalui; (1) Mengeluarkan perwira-perwira militer yang ikut terlibat dalam persoalan sosial-politik wilayah sipil; (2) Penguatan pembentukan sistem kepartaian yang mendukung terhadap berkembang dan berdayanya sistem parlementer guna terwujudnya keterbukaan pertanggungjawaban (*accountability*) pada masyarakat; (3) Membuka keran-keran partisipasi seluas mungkin agar tuntutan dan dukungan warga dapat teragregasi dengan maksimal; dan (4) Menumbuhkembangkan otonomi partisipasi yang selama ini selalu dimobilisasi.⁶

⁵ Asep Sahid Gatara FH dan Subhan Sofhian, *Op. Cit.*, hlm. 129.

⁶ *Ibid.*, hlm. 131

Studi demokrasi ini kemudian bergerak pada awalnya berakar pada konseptualisasi mengenai institusionalisasi yang dianggap mewakili masyarakat seperti partai politik. Selanjutnya berkembang atau bergeser, di mana institusi yang mewakili masyarakat ternyata tidak terbatas pada partai politik saja, tetapi juga telah melibatkan institusi atau aktor lain seperti lembaga akademis (perguruan tinggi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi sosial-kemasyarakatan, dan media massa. Keberadaan aktor-aktor demokrasi tersebut dalam konteks ini merupakan bagian dari penguatan *civil-society* yang dianggap secara signifikan memberikan kontribusi terhadap berdirinya demokratisasi.⁷

Demokrasi – Pasar (*Market -- Democracy*)

Studi demokrasi ini melihat bahwa pasar atau sistem ekonomi pasar (kapitalisme) merupakan prasyarat bagi tumbuhkembangnya sebuah paham dan praktik demokrasi. Robert Dahl memberikan argumentasi mengapa kapitalisme pasar mendukung lahir dan kuatnya demokrasi, di antaranya;⁸ *pertama*, kapitalisme pasar secara khusus telah menguasai pertumbuhan ekonomi dan ekonomi itu mendukung demokrasi, dengan cara mengurangi kemiskinan yang tajam dan memperbaiki standar kehidupan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membantu mengurangi konflik-konflik sosial dan politik; *Kedua*, pasar memberikan banyak informasi penting yang dibutuhkan segenap entitas ekonomi (individu-individu atau perusahaan-perusahaan, seperti para

⁷ *Ibid.*, hlm. 130

⁸ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 221 – 229.

pemilik, pekerja, manajer, firma, pertanian, dan lainnya); *Ketiga*, sebagai konsekuensi sosial dan politiknya, ia menciptakan strata kelas menengah yang besar yang mencari pendidikan, otonomi, kemerdekaan pribadi, hak-hak milik, norma hukum, dan partisipasi dalam pemerintahan; *Keempat*, dengan mendesentralisasikan banyak keputusan ekonomi pada perusahaan-perusahaan dan kepada individu-individu yang relatif mandiri, suatu ekonomi kapitalisme-pasar menghindari kebutuhan akan kekuasaan, bahkan pemerintahan pusat yang otoriter.

Adapun karakter dari demokrasi pasar (*market-democracy* atau demokrasi dalam kapitalisme) itu sendiri, menurut Schumpeter dan Anthony Downs, seperti dikutip oleh Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian,⁹ adalah: (1) Keinginan atau kemauan publik bukanlah yang asli (*genuin will*) melainkan suatu kemauan yang dibuat (*manufactured will*), yakni dibuat dengan cara-cara yang “tepat sama dengan cara-cara periklanan komersial”; (2) Publik tidak mengangkat dan memutuskan masalah-masalah, melainkan sebaliknya masalah-masalah itu sendiri yang menentukan keberadaan mereka, secara formal diangkat dan diputuskan bagi mereka; dan (3) Aspirasi publik dalam kontestasi politik, seperti pemilu, tidak mengalir dari inisiatifnya melainkan dibentuk, dan pembentukannya itu merupakan bagian yang esensial dalam proses demokrasi.

2. Urgensi Partai Politik Dalam Sistem Negara Demokrasi

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis sehingga dalam membicarakan

⁹ Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Op. Cit.*, hlm. 132

demokrasi, tentu tidak akan terlepas dari perbincangan tentang organisasi (*democracy is inconceivable without organization*). Sebagai argumentasi dari statemen tersebut adalah massa (rakyat) yang besar hanya bisa menyalurkan kehendak bersama (*collective will*) mereka melalui organisasi, baik karena pertimbangan teknis dan mekanik maupun alasan psikologis dalam rangka merealisasikan kedaulatan mereka.¹⁰

Organisasi yang dimaksud oleh statemen di atas itu tidak lain adalah partai politik karena tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri sehingga suatu sistem politik yang hanya dengan satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali (*“A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”*).¹¹ Karenanya, pada negara-negara dunia ketiga dan negara-negara sosialis yang anti demokrasi sekali pun dengan kepemimpinan yang diktator juga mendirikan partai-partai politik, meskipun eksistensi dari partai-partai politik itu semu. Terutama sejak tahun 1990-an ketika terjadi gelombang demokratisasi, jumlah dan variasi partai politik semakin berkembang seperti yang bisa dilihat di negara-negara Amerika Selatan, Eropa Timur, dan Asia, yang

¹⁰ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Cetakan ke-1, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 50 – 51.

¹¹ Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe*, third edition, Oxford University Press, Britain, 1998, hlm. 86.

termasuk di dalamnya adalah Indonesia.¹² Jadi pada dasarnya, kelahiran partai politik dipicu oleh meluasnya kesadaran bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dan perlu diikutsertakan dalam proses politik.¹³ Artinya, partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Dalam sistem negara demokrasi, partai politik meyenggarakan beberapa fungsi yang pada umumnya para ilmuwan politik mendeskripsikan adanya empat fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik dalam hal ini berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau *political interest* yang terdapat dalam masyarakat. Berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Dengan kata lain, fungsi partai politik dalam konteks ini adalah sebagai perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan politik dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang

12 Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 20014 dan Konsolidasi Demokrasi*, Cetakan ke-1, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm. 118.

13 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 159.

14 *Ibid.*, hlm. 163 – 164.

mengkaitkannya dengan aksi politik pada masyarakat politik yang lebih luas.¹⁵

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Berkaitan dengan fungsi komunikasi politik di atas, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan “feedback” berupa dukungan dari masyarakat luas. Kedudukan partai politik dalam konteks ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rulers*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*). Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai suatu proses yang melalui masyarakat budaya politik disampaikan berupa norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam rangka terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan rumusan sosialisasi politik yang dikemukakan oleh M. Rush sebagai berikut:

Sosialisasi politik ialah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions ti political phenomena*).¹⁶

15 Sigmund Neuman, “Modern Political Parties”, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 406.

16 *Ibid.*, hlm. 407.

Maka, melalui sosialisasi politik masyarakat akan mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *public service* dan aspirasi masyarakat yang direalisasikan oleh pemerintah. Alfian menekankan sosialisasi politik dalam dua aspek, yaitu: *Pertama*, sosialisasi politik merupakan bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga akan berjalan secara terus-menerus. *Kedua*, sosialisasi politik merupakan proses transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.¹⁷

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Dalam rangka memenuhi kepentingan internalnya, setiap partai politik butuh kader yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Dengan cara seperti itu partai politik dapat menempatkan kade-kader di kancah kepemimpinan nasional. Selain itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah keanggotaan dengan cara memperluas kesempatan bagi organisasi-organisasi massa untuk menjadi *onderbouw* partai politik yang bersangkutan yang bisa melibatkan kaum buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya. Dengan demikian, rekrutmen politik

¹⁷ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 235.

menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih para calon pemimpin.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Fungsi keempat ini bertujuan untuk merespons terdapatnya nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*) partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interest*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan partai politik.

C. Partai Politik Lokal Aceh Sebagai Instrumen Demokratisasi

Pada beberapa negara di belahan dunia, telah terjadi perkembangan sistem kepartaian yang dikenal dengan sebutan partai politik lokal. Sistem kepartaian tersebut mula-mula berkembang di Inggris, dan kini seiring dengan makin berkembangnya kehidupan politik global yang menyebabkan partai politik lokal tersebut makin cenderung dipergunakan oleh negara-negara di dunia. Secara praksis, partai politik lokal tersebut sudah dipraktikkan di hampir seluruh Eropa, Karibia, Kanada, India dan banyak negara di Afrika dan Asia (bekas

jajahan Inggris). Kehadiran partai politik lokal dimungkinkan karena sistem pemilihan yang dianut adalah sistem distrik di mana para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat dari daerah pemilihannya. Pemilihan langsung seorang anggota legislatif atau kepala daerah bisa diwakili oleh partai politik lokal. Sistem tersebut kini dipraktikkan di banyak negara Amerika Latin, Filipina, Perancis, Polandia, dan Amerika Serikat.¹⁸

Di Indonesia sendiri, wacana pembentukan partai politik lokal sudah sangat sering dibicarakan oleh para aktivis politik yang merasa tidak puas dengan kinerja dari partai politik yang ada saat ini. Mereka menganggap bahwa partai politik yang ada saat ini tidak dapat secara representatif mewakili aspirasi warga masyarakat untuk memperoleh hak-hak politik mereka,¹⁹ seperti yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Selain itu, para aktivis politik tersebut juga menganggap bahwa partai politik yang ada saat ini hanya merupakan kendaraan politik dari beberapa orang dan atau golongan untuk mendapatkan kekuasaan yang nantinya akan digunakan untuk memakmurkan diri pribadi dan golongannya saja, tanpa memperdulikan nasib konstituen yang memilih mereka pada pemilu sebelumnya, terutama nasib warga masyarakat miskin yang ada di daerah-daerah pelosok.

Tepat pada tanggal 15 Agustus 2005, lembaran sejarah baru dari sistem kepartaian di Indonesia mulai terbuka karena

18 Partai Politik Lokal, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/13/opini/2436084.htm>

19 Endang Zaelani Sukaya, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 78.

pada tanggal tersebut telah ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam nota kesepahaman tersebut terdapat kesepakatan dari pihak Pemerintah RI untuk mempersilakan GAM membentuk suatu wadah politik yang berbentuk partai politik lokal, yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung seluruh aspirasi politik masyarakat Aceh pada umumnya dan anggota GAM pada khususnya yang telah lama dikesampingkan oleh pemerintah yang berkuasa sebelum era reformasi. Nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM tersebut terkait dengan pembentukan partai politik lokal Aceh menyebutkan secara eksplisit sebagai berikut:²⁰

1.2. Partisipasi Politik

- Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut;

20 Lihat: Poin 1. 2. dengan sub judul "Partisipasi Politik" dari Memorandum of Understanding antara Pemerintah RI dan GAM yang telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya;
- Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009;
- Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh;
- Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006;
- Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia;
- Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar; dan
- Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

Untuk selanjutnya, pengaturan mengenai partai politik lokal yang akan dibentuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dituangkan dalam undang-undang Pemerintahan Aceh.²¹ Pengaturan tersebut kemudian disusul dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal

²¹ Lihat: Pasal 75 – pasal 97 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

di Aceh. Dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa partai politik lokal di Aceh sebagaimana halnya partai politik nasional juga menjalankan fungsi-fungsi yang dilkauan oleh partai politik nasional. Menurut sistem kepartaian di Indonesia, sebagaimana partai politik nasional partai politik lokal di Aceh juga berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional. Hanya saja, pemberian kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik itu bersifat terbatas, yaitu hanya di daerah Aceh seperti yang tertuang dalam penegasan Pasal 80 ayat (1) huruf d dan h UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk dalam kerangka kekhususan yang telah diberikan oleh pemerintah RI sehingga visi maupun misi dari partai politik lokal Aceh tersebut diizinkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah maupun nilai-nilai religi. Dalam perkembangannya partai-partai politik lokal di Aceh telah bermunculan, dan telah mengambil bagian dalam pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu. Terdapat dua belas partai politik lokal di Aceh yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu:²² (1) Partai Atjeh Meudaulat; (2) Partai Bersatu Atjeh; (3) Partai Daulat Aceh; (4) Partai Lokal Aceh; (5) Partai Rakyat Aceh; (6) Partai Aceh Aman Sejahtera; (7) Partai Aliansi Rakyat Aceh; (8)

²² Edwin Yustian Driyartana, "Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi" *Skripsi*, FH - UNS, Surakarta, 2010, hlm. 72 – 80.

Partai Pemersatu Muslimin Aceh; (9) Partai Serambi Persada Nusantara Serikat; (10) Partai Darussalam; (11) Partai Gabthat; dan (12) Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Meskipun dari kedua belas partai politik lokal Aceh tersebut di atas, hanya enam partai yang dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU pusat dan dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009 yang lalu. Keenam partai politik lokal Aceh tersebut adalah: (1) Partai Aceh; (2) Partai Suara Independen Rakyat Aceh; (3) Partai Bersatu Atjeh; (4) Partai Rakyat Aceh; (5) Partai Aceh Aman Sejahtera; dan (6) Partai Damai Aceh. Akan tetapi, Pemilihan umum lokal di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu telah mengukir babak baru dalam sejarah sistem kepartaian di Indonesia. Partai politik lokal Aceh yang *notabene* terhitung baru dalam sistem kepartaian di Indonesia justru menang secara mutlak jauh mengungguli partai-partai nasional yang telah ada lebih dahulu. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan umum lokal Aceh tahun 2009:²³

| No. | Nama Partai | Total | Persentase (%) |
|-----|---|-----------|----------------|
| 1. | Partai Aceh | 1.007.713 | 46,91% |
| 2. | Partai Demokrat | 232.728 | 10,84% |
| 3. | Partai Golongan Karya | 142.411 | 6,63% |
| 4. | Partai Amanat Nasional | 83.060 | 3,78% |
| 5. | Partai Keadilan Sejahtera | 81.529 | 3,80% |
| 6. | Partai Persatuan Pembangunan | 73.964 | 3,45% |
| 7. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 41.278 | 1,92% |
| 8. | Partai Daulat Atjeh | 39.706 | 1,85% |

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

| | | | |
|-----|---|--------|-------|
| 9. | Partai Suara Independen Rakyat Aceh | 38.157 | 1,78% |
| 10. | Partai Bulan Bintang | 37.336 | 1,74% |
| 11. | Partai Bintang Reformasi | 37.025 | 1,72% |
| 12. | Partai Rakyat Aceh | 36.574 | 1,70% |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat | 30.617 | 1,43% |
| 14. | Partai Kebangkitan Bangsa | 30.257 | 1,41% |
| 15. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 28.378 | 1,32% |
| 16. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.773 | 1,01% |
| 17. | Partai Peduli Rakyat Nasional | 19.064 | 0,89% |
| 18. | Partai Karya Peduli Bangsa | 17.572 | 0,82% |
| 19. | Partai Bersatu Atjeh | 16.602 | 0,77% |
| 20. | Partai Patriot | 15.054 | 0,70% |
| 21. | Partai Kebangkitan Nasional Indonesia Ulama | 14.846 | 0,69% |
| 22. | Partai Aceh Aman Sejahtera | 11.117 | 0,52% |
| 23. | Partai Pengusaha dan Pkerja Indonesia | 10.380 | 0,48% |
| 24. | Partai Persatuan Daerah | 9.723 | 0,45% |
| 25. | Partai Barisan Nasional | 8.460 | 0,39% |
| 26. | Partai Matahari Bangsa | 7.294 | 0,34% |
| 27. | Partai Indonesia Sejahtera | 5.285 | 0,25% |
| 28. | Partai Damai Sejahtera | 5.245 | 0,24% |
| 29. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 5.187 | 0,24% |
| 30. | Partai Demokrasi Pembaruan | 4.475 | 0,21% |
| 31. | Partai Pemuda Indonesia | 4.180 | 0,19% |
| 32. | Partai Kedaulatan | 3.881 | 0,18% |
| 33. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 3.562 | 0,17% |
| 34. | Partai Nasional Banteng Kerakyatan | 3.421 | 0,16% |
| 35. | Partai Republika Nusantara | 3.362 | 0,16% |
| 36. | Partai Pelopor | 3.150 | 0,15% |
| 37. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 2.658 | 0,12% |
| 38. | Partai Merdeka | 2.502 | 0,12% |
| 39. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 2.422 | 0,11% |
| 40. | Partai Karya Perjuangan | 1.859 | 0,09% |

| | | | |
|-----|---|-----------|-------|
| 41. | Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia | 1.689 | 0,08% |
| 42. | Partai Serikat Indonesia | 1.052 | 0,05% |
| 43. | Partai Buruh | 827 | 0,04% |
| 44. | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 00 | 0,00% |
| | Total Suara Sah | 2.146.854 | 100% |

Sumber: www.algrp.anu.edu.au

Dari tabel perolehan suara pada pemilihan umum lokal Aceh tahun 2009 di atas, dapat dilihat bahwa perolehan suara partai politik lokal Aceh telah mengungguli perolehan suara partai-partai nasional. Partai Aceh yang merupakan transformasi dari GAM telah berhasil merebut simpati masyarakat Aceh sekaligus mempertegas keberadaan partai politik lokal Aceh diantara partai-partai nasional Indonesia. Hal ini terbukti dengan perolehan suara yang sangat fenomenal telah diraih oleh Partai Aceh dalam pemilihan umum lokal untuk pertama kalinya, meskipun keberadaannya merupakan pendatang baru dalam sistem kepartaian di Indonesia.²⁴

D. Penutup

Dengan demikian, maksud dan tujuan dibentuknya partai politik lokal Aceh yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh pada umumnya dan para mantan anggota GAM pada khususnya dalam hal penyaluran aspirasi politik mereka masing-masing telah terlihat hasilnya. Hal tersebut harus diakui merupakan implikasi adanya perubahan dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi, maka penyelesaian masalah separatisme sangat relevan menggunakan mode

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

demokrasi dalam konteks ke-Indonesia-an yang sedang mengalami transisi demokrasi, ternyata mampu mengubah perspektif elit yang berkuasa dalam menyelesaikan konflik separatisme. GAM sebagai kelompok separatis memengakui betul bahwa demokrasi lokal di Aceh, telah mampu menciptakan perubahan politik secara cepat sebagai strategi transformasi kekuatan bersenjata menjadi kekuatan politik.²⁵ Artinya, demokrasi lokal pada masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah terjadi penguatan secara signifikan melalui partai-politik lokal.

²⁵ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI – GAM dalam Perundingan Helsinki*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 201 – 2004.